



*Analysis of the Readiness of Local Governments in Implementing Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management*

Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Arif Gunabar Fatahilla<sup>1</sup>, Yesi Mutia Basri<sup>1\*</sup>, Desmiyawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Riau

\* Corresponding author : [yesimutia@gmail.com](mailto:yesimutia@gmail.com)

**INFO ARTIKEL**

**Histori Artikel:**

Tanggal Masuk 13 September 2020  
 Tanggal Diterima 17 Desember 2020  
 Revisi Diterima 16 Maret 2021  
 Tersedia Online 31 Maret 2021

**Keywords:**

**Human Resources Competence of, Leadership Style, Readiness of PP 12 Year 2019, Use and Utilization of Information Technology**

**Kata Kunci:**

**Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesiapan PP 12 Tahun 2019, Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi**

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the readiness of the Kampar Regency Government in implementing PP No. 12 of 2019. The population in this study is all SKPD in the Kampar district, amounting to 48 SKPD. The sampling technique using saturated sampling method. A total of 112 respondents participated in the research consisting of Budget User Proxy, Technical Implementation Officials of Activities, Head of Finance Subdivision, and Financial Staff Staff. The data collection technique is carried out by using questionnaires which is sent directly to the respondent. The results of the analysis using multiple regressions show Human Resource Competence, Utilization and Use of Technology and Information, Leadership Style affects Readiness in Implementation of Government Regulation No.12 of 2019. The results of this study have contributed to the government in preparing for the implementation of regulatory changes.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Kabupaten kampar dalam menerapkan PP No 12 Tahun 2019. Adapun populasi dalam penelitian ini Semua SKPD yang ada di kabupaten Kampar yang berjumlah 48 SKPD. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sampling jenuh. Sebanyak 112 responden berpartisipasi dalam penelitian yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kasubag Keuangan, dan Staf Pegawai Keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikirimkan langsung kepada responden. Hasil analisis dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan dan Penggunaan Teknologi dan Informasi, Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kesiapan dalam Implementasi PP No 12 tahun 2019. Hasil penelitian memiliki kontribusi bagi pemerintah dalam menyiapkan implementasi perubahan regulasi.

## 1. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi ini tentu saja berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 mengatur tentang Pemerintahan Daerah memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu membuat sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat dengan tetap patuh pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mengelola keuangan daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. PP ini terdiri dari bab yaitu mengatur ketentuan umum, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD dst. Namun pada tanggal 6 Maret 2019 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengganti Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tersebut.

Perubahan Peraturan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya PP Nomor 12 tahun 2019 ini memiliki banyak pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, diantaranya perubahan mendasar pada Struktur APBD. Perubahan pada Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah".(Nugroho, *rri.co.id*.2019)

Fenomena Perubahan regulasi pada pemerintah daerah bukanlah hal yang baru. Banyak perubahan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka antisipasi terhadap perubahan. Misalnya saja perubahan mengenai standar akuntansi pada pemerintah. Dalam prakteknya pelaksanaan perubahan ini membutuhkan waktu beberapa tahun. Hal ini disebabkan belum siapnya pemerintah dalam mengimplementasikan perubahan regulasi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.

Berbeda dengan PP No 12 tahun 2019 ini pemerintah harus siap dalam menerapkannya paling lambat 2021. Namun dalam implementasi PP ini semestinya sudah harus dilaksanakan sejak diterbitkan. Namun, pelaksanaannya diperlukan masa transisi. PP tersebut paling lambat sudah diberlakukan pada struktur APBD 2021. Adanya perubahan peraturan ini akan menyebabkan terjadi banyak perubahan pada proses perencanaan

struktur APBD 2021 yang dimulai pada tahun 2020. Oleh sebab itu seluruh pemangku kebijakan, khususnya pengelola keuangan harus memahaminya.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai kesiapan pemerintah menghadapi perubahan regulasi. Misalnya penelitian Kusuma, (2013), Hartoyo, (2019), Sitorus & Kalangi (2015). Penelitian tersebut menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PP No 71 Tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Penelitian lainnya (misalnya Rahmawati, 2015 dan Febrina & Burhanuddin, 2013) mengkaji mengenai kesiapan pemerintah Desa dalam mengimplementasikan UU No 6 Tahun 2014. Penelitian-penelitian tersebut menemukan berbagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan perubahan regulasi.

Perubahan pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor penyebab perubahan pada organisasi. Perubahan ini memerlukan berbagai dukungan. Apabila kurangnya dukungan terhadap perubahan maka akan terjadi kegagalan (Purwoko, 2017). Diantara faktor yang mempengaruhi perubahan adalah dukungan dari karyawan. Karyawan merupakan sumber daya manusia yang menjalankan perubahan harus didukung oleh kesiapan SDM yang ditunjukkan dengan kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi pengelola keuangan daerah sangat menentukan kesiapan dalam implementasi perubahan regulasi. Sebagaimana dinyatakan pada penelitian terdahulu (Sampel., & Kalangi, 2015; Kusuma, (2013) bahwa diperlukan kesiapan sumber daya manusia dalam mempersiapkan perubahan peraturan daerah.

Hasil penelitian pada kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan PP No 71 tahun 2010 secara kualitatif juga menemukan teknologi informasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesiapan perubahan regulasi (Made et al., 2015). Teknologi informasi berkaitan dengan tersedianya sistem informasi yang mendukung perubahan pada struktur APBD. Pemanfaatan teknologi informasi akan membantu sumber daya manusia dalam mempercepat serta mengurangi terjadinya kesalahan dalam melakukan pemrosesan data (Wardani & Andriyani., 2017). Oleh sebab itu dalam kesiapan perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah harus didukung dengan kesiapan teknologi informasi. Tidak siapnya teknologi ini akan menyebabkan ditundanya implementasi PP No 12 tahun 2019.

Hal yang tidak kalah penting dalam implementasi perubahan peraturan adalah dukungan atasan. Menurut Simanjuntak (2010) menerangkan bahwa sokongan yang kuat yang diberikan pimpinan dengan kerjasama antar pegawai merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan.

Penelitian sebelumnya (Sari, 2017) tentang kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan PP No 71 tahun 2010 menemukan bahwa gaya kepemimpinan

berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan perubahan.

Uraian diatas menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah dalam mengimplementasikan perubahan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi PP No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Regulasi ini merupakan pengganti PP No 58 tahun 2005 yang telah dicabut oleh Pemerintah Pusat.

Penelitian mengenai perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah ini merupakan penelitian yang baru disebabkan PP No 12 Tahun 2019 memang belum diimplementasikan. Penelitian sebelumnya seperti (Febrina.I.S., Burhanuddin., 2013);Sampel.I.F., Kalangi., 2015);(Humiang.G.P., 2019) telah meneliti kesiapan Pemerintah dalam menghadapi perubahan regulasi penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penelitian tersebut sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menguji pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi dan gaya kepemimpinan terhadap kesiapan Pemerintah dalam mengimplementasikan PP No 12 tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Riau yaitu Pemerintah Kabupaten Kampar.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1.New Public Management (NPM)**

Konsep New Public Management muncul karena kritik keras terhadap organisasi sektor publik dan telah menimbulkan gerakan dan tuntutan terhadap reformasi manajemen sektor publik. New Public Management kemudian mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif hampir diseluruh dunia. Pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi pemberian pelayanan publik merupakan penekanan gerakan New Public Management.

Istilah New Public Management pada awalnya dikenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991 yang kemudian disingkat dengan istilah NPM. Apabila dilihat melalui perspektif sejarahnya, pendekatan modern terhadap manajemen sektor publik tersebut awalnya muncul dari negara-negara Eropa sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Kemunculan pendekatan tersebut merupakan reaksi dan kondisi model administrasi publik tradisional yang tidak memadai.

Implementasi konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Beberapa pihak meyakini bahwa paradigma New Public Management

merupakan sebuah fenomena internasional sebagai bagian dari proses global. Konsep NPM begitu cepat mempengaruhi praktik manajemen publik di berbagai negara sehingga membentuk sebuah gerakan yang mendunia.

## 2.2. Hubungan New Public Management dengan PP No 12 tahun 2019

"Bunea, C. B dan Cosmina (2008;1) menjelaskan bahwa konsep New Public Management yang berfokus pada efisiensi memaksa seluruh pemerintahan yang mengadopsinya untuk bekerja lebih keras dan bertanggung jawab secara akuntabel kepada masyarakat mengenai sumber daya yang digunakan sehingga akuntansi memainkan peranan penting dalam perkembangan New Public Management berkaitan dengan pengukuran kinerja penggunaan sumber daya.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa New Pulic Management memiliki hubungan dengan PP no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan. New Public Management telah mereformasi pengelolaan keuangan sektor publik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada pada sektor swasta dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sektor publik. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan sebuah alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban.

Likierman (2003:3) dalam Ritonga (2015:27) yang menjelaskan bahwa pemerintah yang mengadopsi New Public Managment maka dalam bidang akuntansi harus juga menjalankan akuntansi. Tanpa akuntansi maka adopsi New Pulic Management (NPM) akan berjalan kurang lancar.

Oleh karena itu akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan merupakan konsep yang ada akibat munculnya New Public Management.

## 2.3. Perbedaan PP 58 Tahun 2005 dengan PP 12 Tahun 2019

Regulasi pemerintah tersebut disusun untuk melengkapi aturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya di sebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, juga untuk menopang tiga pilar Pengelolaan keuangan Daerah agar baik: yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif

Berdasarkan penjelasan martani (2019) "menyatakan terdapat pokok-pokok perubahan dari PP 58 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas" :

1. Penegasan KDH Berkedudukan Sebagai Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Atau Pemegang Saham Perseroan Daerah.
2. Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat pejabat struktural.
3. Merinci Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

4. Pengaturan Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan, menteri keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.
5. Pengaturan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Dalam hal belum adanya PP, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
6. Penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan rancangan KUA dan PPAS apabila KDH dan DPRD tidak bersepakat.
7. Dalam hal hasil evaluasi APBD Daerah tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum.
8. Pengaturan dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri keuangan.
9. Pengaturan dalam hal Pengelola Keuangan Daerah yang berhalangan sementara, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas pengelola Keuangan Daerah.
10. Pengaturan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan.

Selain itu, perubahan lainnya dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah pada struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mana perubahan tersebut menyelaraskan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”.

#### 2.4 Kesiapan Penerapan PP No 12 Tahun 2019

Herlina (2013), mendefinisikan “kesiapan (readiness) sebagai pertanda kognitif terhadap sikap dari Perlawanan atau dukungan atas upaya perubahan”. Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Adventana (2014), “adalah sikap menyeluruh yang akan mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi, proses, konteks, dan seseorang melibatkan dan secara bersama-sama merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo”.

“Arikunto, (2004:54) menyatakan “kesiapan adalah suatu kompetensi sehingga individu

yang memiliki kompetensi tersebut mempunyai kesiapan yang cukup untuk melakukan sesuatu". Hal ini bermakna kesiapan adalah suatu kondisi yang diterima oleh individu telah memiliki kesiapan untuk melakukan sesuatu". "(KSAP,2010) dalam kesiapan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual mendefinisikan kesiapan adalah sebagai rangkaian atau hal-hal yang akan dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka mengimplementasikan PP Nomor 12 Tahun 2019".

## 2.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

"Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan". Sedangkan menurut "(Edison, 2016). kompetensi adalah skill individu untuk mengerjakan sebuah aktivitas dengan baik dan mempunyai kelebihan yang didasarkan pada ketentuan yang berkaitan pada pengetahuan (knowledge), kemampuan (skill) dan sikap (attitude)".

Jadi kompetensi sumberdaya manusia meliputi keahlian seseorang dalam organisasi atau suatu aturan dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi atau wewenangnya agar tercapai keinginan secara efektif dan efisien. Kedudukan harus dilihat sebagai kompetensi agar tercapai tujuan dan menghasilkan *outputs dan outcome*. Menurut "Delanno & Deviani (2013). Menyatakan sumberdaya manusia bisa diukur dari rata-rata pendidikan, *training*, dan pengalaman. Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang universal dalam kehidupan seseorang. *training* adalah langkah-langkah yang tersusun agar merubah tingkah laku individu agar tercapai tujuan organisas. *Training* yang bagus harus sesuai dengan kemampuan dan skill untuk menunjang pelaksanaan kinerjanya. Pengalaman bisa di lihat dari berapa lama individu itu bekerja".

Menurut Riandi & Lismawati (2012). "kemahiran, pemahaman, dan kompetensi yang memadai yang dimiliki individu sangat penting, sebab hal itu adalah hal pokok yang harus dikuasai seseorang". Zuliarti (2012). Kompetensi adalah ciri-ciri yang dimiliki individu dalam menunjang pekerjaannya. Karyawan yang yang tidak memiliki keahlian akan menghadapi berbagai persoalan yang tentunya akan menghambat kinerja dari suatu organisasi

## 2.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut (perpres nomor 59 tahun 2018) tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dijelaskan bahwa Teknologi informasi merupakan metode untuk mengakumulasi, mengemasi, mencadangkan, mengerjakan, menginfokan, menganalisis, dan menyampaikan informasi "Uno & Lamatenggo (2011:57) Menyatakan teknologi informasi merupakan *technology* dapat dipergunakan dalam memproses pengolahan data. Termasuk dalam mengolah, memperoleh data, menyusun, menyimpan, dan memalsukan data tersebut dalam berbagai bentuk agar memperoleh informasi yang berkualitas, seperti informasi yang akurat,

relevan, dan tepat waktu”.

## 2.7 Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kebutuhan bagi setiap organisasi/instansi dalam melaksanakan pekerjaan agar tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting karena penyusunan–penyusunan arah untuk mencapai tujuan, mengkomunikasikan dengan pegawai, memotivasi, itu berada di tangan seorang pemimpin.

Menurut “Rivai (2014). gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang dimanfaatkan pemimpin untuk memengaruhi karyawan dengan tujuan sasaran organisasi terwujud atau bisa dikatakan pula bahwa gaya kepemimpinan adalah pola sifat dan langkah yang disenangi dan selalu diimplementasikan oleh seorang pemimpin”. Gaya kepemimpinan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dipersiapkan untuk menghubungkan maksud suatu organisasi dengan maksud individu untuk mencapai keinginan tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses seorang pemimpin dalam rangka meyakinkan pegawainya dengan kompetensi yang dimiliki agar tercapai tujuan organisasi.

### 2.7.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Penerapan PP No 12 Tahun 2019

“Kompetensi adalah ciri-ciri individu yang mempunyai, keahlian, kepandaian, kapasitas dalam melakukan pekerjaan seperti pengelolaan keuangan Hevesi, (2005)”. Kompetensi melihat pada kapabilitas secara *general* menggerakkan pekerjaan sesuai kapabilitas, selanjutnya kompetensi juga terlihat pada suatu rangkaian, sifat yang di tampilkan seseorang dengan maksud melakukan tugas dan fungsi kedudukan dengan kemampuan yang dimiliki

Prihadi (2004) menyatakan “komptenesi sumberdaya manusia menggambarkan nilai usaha yang diberikan kepada individu dalam jangka waktu tertentu agar menghasilkan jasa dan barang”. Kelemahan pada pengelolaan keuangan daerah berdasarkan regulasi terbaru yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 dapat dihindari dengan tersedianya Kompetensi sumber daya manusia yang dapat memahami PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut. Dipertegas oleh pendapat Davis, N. (2010) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi yaitu sumber daya manusia. Pengimplementasian PP Nomor 12 tahun 2019 membutuhkan sumber daya manusia yang betul-betul memahami dan berkompeten dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh “Susanti et al. (2015) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap Implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual”. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Permana et al. (2016). menunjukkan bahwa sumber daya manusia

berpengaruh signifikan terhadap Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemda Berbasis Akrua". Maka berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam pemahaman PP Nomor 12 Tahun 2019, maka tingkat penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>1</sub> : Kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kesiapan Penerapan PP No 12 Tahun 2019.**

#### 2.7.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kesiapan Penerapan PP No 12 Tahun 2019.

"Kusuma, (2013). menyatakan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang lebih berkembang mungkin lebih dapat menerapkan system akuntansi manajemen baru dari pada organisasi dengan system informasi yang belum canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah". Persiapan sistem informasi yang memadai sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada PP Nomor 12 Tahun 2019 agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga semakin maju teknologi informasi yang digunakan SKPD dalam menerapkan suatu kebijakan, maka semakin tinggi tingkat kesiapan penerapan dari kebijakan tersebut. "Sistem informasi dapat menghasilkan informasi yang bisa diterima, mampu memberi harapan informasi secara akurat dan bisa dipercaya. Nugroho, W. (2001)". Selain itu menurut John (1995:8 sistem informasi merupakan gabungan: manusia, fasilitas, alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bertujuan mengatur koneksi komunikasi yang vital, yang tertentu dan berlanjut, membuat manajemen terbantu dalam penggunaan *intern* dan *ekstern* serta menyediakan alasan dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini menandakan fungsi utama system informasi yaitu menyediakan informasi sebagai pendukung yang membantu proses perencanaan, pengendalian serta fungsi manajemen sehingga segala bentuk proses pekerjaan rutin maupun transaksi manajemen akan tertata dengan rapi.

Didalam hal ini teknologi informasi semisal hardware dan software yang tersedia untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 diharapkan dapat membantu OPD dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Hasil penelitian yang dilakukan oleh "Ajhar & Pituringsih (2015). menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrua Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". Kemudian hasil penelitian "Pratiwi et al. (2017). menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap Kesiapan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua". Maka berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa semakin memadai teknologi informasi OPD dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai PP

Nomor 12 Tahun 2019, maka semakin tinggi tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka Hipotesisi yang diajukan adalah ,

**H<sub>2</sub> :Teknologi informasi berpengaruh terhadap Kesiapan Penerapan PP No 12 Tahun 2019.**

#### 2.7.3 Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kesiapan Penerapan PP No 12 Tahun 2019.

Gaya kepemimpinan merupakan aturan perilaku/sifat yang digunakan individu pada waktu seseorang tersebut mencoba mempengaruhi seseorang seperti yang ia lihat( Izzaty & Rohman ,2011). Menurut “Simanjuntak (2010) menyebutkan dengan adanya dukungan yang kuat dari pemimpin dan adanya kerjasama yang baik dengan karyawan adalah kunci keberhasilan dari suatu perubahan”. Diantara yang menyebabkan lemahnya penyusunan laporan keuangan di beberapa kementerian/lembaga diantaranya lemahnya komitmen pemimpin pada satuan kerja terutama pada satuan kerja perangkat daerah penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. Selanjutnya menurut “Ritonga, Irwan Taufiq. (2010) menyebutkan mesti ada komitmen dan serta sokongan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 membutuhkan dana yang cukup besar dan jangka waktu yang sedikit lama”. Sehingga semakin kuat dukungan dari pimpinan dalam suatu organisasi terhadap penerapan suatu kebijakan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh “Sari (2017) menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP berbasis akrual. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian “Putra dan Ariyanto, (2015) menunjukkan hasil bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual”. Maka berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa semakin baik dan diterimanya gaya kepemimpinan dalam suatu OPD dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, maka semakin tinggi tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut Berdasarkan deskripsi tersebut maka hipotesis yang diajukan untuk variable ini adalah:

**H<sub>3</sub> : Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kesiapan Penerapan PP No 12 Tahun 2019**

### 3. Metodologi Penelitian

### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kampar yang berjumlah 48 OPD, yang terdiri dari: 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 2 Badan, 1 Kantor dan 27 Dinas dan 21 kecamatan. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat daerah (PPK OPD) yang terdiri atas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Staf Sub Bagian Keuangan. Perangkat OPD yang terdiri Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Total jumlah responden dalam penelitian ini adalah 150 orang.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan dan mengirimkan Kuesioner (angket) secara langsung kepada responden yang telah ditentukan dan pengembalian kuisisioner dilakukan sekitar 1 minggu yang dijemput kembali kepada responden sesuai dengan kesepakatan.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

#### Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 (Y)

“KSAP (2010) dalam kesiapan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual mendefinisikan kesiapan adalah sebagai kegiatan atau hal-hal yang akan dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka mengimplementasikan PP Nomor 12 Tahun 2019. Untuk mengukur variabel Kesiapan Penerapan PP 12 Tahun 2019, peneliti menggunakan instrument yang Holt et al. (2007).

#### 3.3.1 Kompetensi Sumber daya manusia(X1)

Menurut “Indriasari & Nahartyo (2008) untuk menilai kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dalam melakukan suatu fungsi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dinilai dari yang tertuang dalam penjelasan jabatan. penjelasan jabatan merupakan kunci dasar untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Tanpa adanya penjelasan kedudukan yang jelas, maka sumberdaya tersebut tidak akan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.”

“Hevesi & Alan (2005) menyatakan kompetensi merupakan suatu ciri-ciri dalam diri seseorang yang mempunyai keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan termasuk dalam pengelolaan keuangan”.

### 3.3.2 Pemanfaatan dan Penggunaan Teknologi Informasi (X2)

“Hariyanto. (2014) Teknologi informasi merupakan suatu pengertian umum yang mendeskripsikan teknologi apapun yang meringankan manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi”. Teknologi informasi ini diharapkan sebagai suatu sistem informasi yang dapat menunjang tercapainya keefektifan dan keefisienan organisasi. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur kesiapan Teknologi dan informasi adalah kuesioner yang dikembangkan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan teknologi dan informasi. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan indikator Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008).

### 3.3.3 Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kebutuhan bagi setiap organisasi dalam melaksanakan pekerjaan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting karena penyusunan-penyusunan arah untuk mencapai tujuan,

Rivai, (2014) menyatakan Gaya kepemimpinan dalam organisasi mempunyai peran yang sangat menentukan dalam mencapai tujuan organisasi. Maka seorang pemimpin dapat mempengaruhi bawahannya untuk dapat meningkatkan kinerjanya”.

Seluruh variabel Variabel diukur menggunakan skala ordinal 5 point, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

## 3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda (Multiple Regression Analysis). Dengan pengolahan data melalui software SPSS (Statistical Package for Social Science). Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

Y: Penerapan PP No 12 tahun 2019 : Kesiapan Penerapan PP No 12 tahun 2019

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$  : Koefisien Regresi

X1: Sumber daya manusia

X2 : Teknologi Informasi

X3: Gaya Kepemimpinan

$\varepsilon$  : Error

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Dari kuesioner yang disebar sebanyak 150 eksemplar, yang kembali dan layak diolah adalah sebanyak sebanyak 112. Sedangkan 34 kuesioner yang dikembalikan tidak diisi secara keseluruhan dan dikembalikan dalam keadaan kosong (tidak diisi sama sekali). Tingkat pengembalian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang dikirim	150	100%
Kuesioner yang kembali	112	74%
Kuesioner yang tidak mendapatkan respon	34	26%
Kuesioner yang dapat diolah	112	74%

Sumber : Data Olahan (2020).

Deskripsi demografi responden dalam penelitian ini menjelaskan tentang jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, dan masa kerja responden yang dapat dilihat pada tabel 4.2 dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase berikut:

**Tabel 4.2 Demografi Responden**

Keterangan	Frekuensi	Persentasi
<b>Jenis kelamin :</b>		
Laki-laki	54	47,86%
Perempuan	58	
<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>
<b>Pendidikan Terakhir:</b>		
SLTA	15	13,40%
D3	4	3,57%
S1	80	71,42%
S2	13	11,60
S3	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>
<b>Usia:</b>		
21-30	11	9,82%
31-40	42	37,5%
41-50	53	47,32%
>50	6	5,35%
<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>
<b>Jabatan:</b>		
Kasubag Keuangan	26	23,21%
Staf Keuangan	46	41,07%
Kuasa Pengguna Anggaran	22	19,64%
PPTK	18	16,07%
<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>
<b>Masa Kerja :</b>		
1-10 Tahun	47	41,96%
10-20 Tahun	53	47,32%
>20 Tahun	12	10,71 %

<b>Jumlah</b>	<b>112</b>	<b>100%</b>
---------------	------------	-------------

Sumber : Data Olahan, 2020

#### 4.2. Hasil Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3 Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA	112	15	30	28.01	2.615
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	112	22	35	33.11	2.432
GAYA KEPEMIMPINAN	112	19	30	26.85	2.590
KESIAPAN PENERAPAN PP 12 TAHUN 2019	112	20	35	32.17	3.081
Valid N (listwise)	112				

Sumber : Data diolah SPSS 25.0, 2020.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memperoleh nilai mean sebesar 28,01, diperoleh standar deviasi sebesar 2,615, nilai maksimum jawaban responden sebesar 30 dan nilai minimum jawaban responden sebesar 15. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memperoleh nilai mean sebesar 33,11, diperoleh standar deviasi sebesar 2,432, nilai maksimum jawaban responden sebesar 35 dan nilai minimum jawaban responden sebesar 22. Variabel Gaya Kepemimpinan memperoleh nilai mean sebesar 26.85, diperoleh standar deviasi 2.590 nilai maksimum jawaban responden sebesar 30 dan nilai minimum jawaban responden sebesar 19 Dan variabel kesiapan penerapan PP 12 Tahun 2019 memperoleh nilai mean sebesar 32,17, diperoleh standar deviasi sebesar 3,081, nilai maksimum jawaban responden sebesar 35 dan nilai minimum jawaban responden sebesar 20.

#### 4.3 Hasil Uji Validitas Data

Hasil uji validitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019**

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
1		Y1	0.893	0.185	Valid
2	Kesiapan	Y2	0.790	0.185	Valid
3	penerapan PP	Y3	0.893	0.185	Valid
4	Nomor 12	Y4	0.420	0.185	Valid
5	Tahun 2019	Y5	0.498	0.185	Valid

No	Variabel	Item	R Hitung	R tabel	Keterangan
6	(Y)	Y6	0.893	0.185	Valid
7		Y7	0.790	0.185	Valid

Sumber: Data diolah 2020.

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil uji validitas terhadap variabel kesiapan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 diperoleh r hitung > r tabel yang berarti bahwa data tersebut valid.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Data Kompetensi Sumber Daya Manusia**

No	Variabel	Item	R Hitung	R table	Keterangan
1		KS1	0.803	0.185	Valid
2	Kompetensi	KS2	0.824	0.185	Valid
3	Sumber Daya	KS3	0.851	0.185	Valid
4	Manusia	KS4	0.798	0.185	Valid
5	(X1)	KS5	0.732	0.185	Valid
6		KS6	0.578	0.185	Valid

Sumber: Data diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji validitas terhadap kompetensi sumber data manusia diperoleh bahwa r hitung > r tabel yang berarti bahwa data tersebut valid.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Data Pemanfaatan & Penggunaan Teknologi Informasi**

No	Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1		TI1	0.675	0.185	Valid
2	Pemanfaatan	TI2	0.703	0.185	Valid
3	Teknologi	TI3	0.424	0.185	Valid
4	Informasi	TI4	0.737	0.185	Valid
5	(X2)	TI5	0.862	0.185	Valid
6		TI6	0.761	0.185	Valid
7		TI7	0.696	0.185	Valid

Sumber: Data diolah 2020

Dari table diatas bahwa variable Pemanfaatan Teknologi teknologi Informasi berdasarkan uji validitas data, diperoleh nilai r hitung > r tabel yang berarti data tersebut valid.

**Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Data Gaya Kepemimpinan**

No	Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1		GK1	0.474	0.185	Valid
2		GK2	0.612	0.185	Valid
3	Gaya	GK3	0.597	0.185	Valid
4	Kepemimpinan	GK4	0.784	0.185	Valid
5	(X3)	GK5	0.763	0.185	Valid
6		GK6	0.687	0.185	Valid

Sumber: Data diolah 2020

Dari table diatas bahwa variable Gaya Kepemimpinan berdasarkan uji validitas data, diperoleh nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yang berarti data tersebut valid.

#### 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Suatu instrument dikatakan reliable jika nilai cronbach' alpha lebih besar dari 0,6 yang Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas adalah *cronbach alpha* dengan cara membandingkan nilai *alpha* dengan standarnya. Koefisien *cronbach alpha* yang lebih dari 0,60 menunjukkan keandalan (reliabilitas) instrument mengacu pada Sugiyono, (2013,:250). Selain itu, yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya.

**Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach' Alpha	Standar Alpha	Koefisien	Keterangan
Y	0,6	0,870		Reliebel
X1	0,6	0,855		Reliebel
X2	0,6	0,813		Reliebel
X3	0,6	0,740		Reliebel

Sumber: Data diolah 2020

Pada Tabel 8 di atas menunjukkan nilai *cronbach alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan untuk semua variabel dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

#### 4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.9 Hasil Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-4.651	1.767			-2.632	.010
KOMPETENSI	.293	.118	.249		2.479	.015
SUMBERDAYA MANUSIA						
PEMANFAATAN	.625	.134	.493		4.671	.000
TEKNOLOGI INFORMASI						
GAYA KEPEMIMPINAN	.294	.064	.246		4.588	.000

a. Dependent Variable: KESIAPAN PENERAPAN PP 12 TAHUN 2019

Data olahan 2020

*Pengaruh Kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kesiapan Penerapan PP No 12 Tahun 2019.*

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (PKPN) No 7 Tahun 2013 menyebutkan untuk menciptakan pengaturan pekerjaan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan keuangan negara dibutuhkan pegawai yang bertanggung jawab, professional, berintegritas dan adil melewati pembinaan yang dilakukan berdasarkan system prestasi performa kinerja dan system karir dititik beratkan pada system prestasi kerja. Maka dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan harus dikelola dengan baik dan benar supaya menjadi potensi dan mendukung tujuan dari organisasi. Tetapi jika kompetensi sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi beban organisasi dan akan menghambat organisasi dalam mencapai tujuan dan implementasi kebijakan.

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa  $t_{hitung} (2.479) > t_{tabel} (1.982)$  dan  $Sig.(0.015) < (0.05)$ . Ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 pada aspek kompetensi sumber daya manusia, menunjukkan semakin berkualitas sumberdaya manusia maka akan mendorong dalam hal kesiapan Pemda dalam mengimplementasikan peraturan tersebut, dan pemda telah mulai mempersiapkan dan melaksanakan perubahan-perubahan sesuai PP 12 Tahun 2019 secara bertahap dalam masa transisi guna mengurangi resiko atas kendala-kendala dan permasalahan yang akan mungkin dihadapi dalam implementasi regulasi tersebut. Didalam penelitian ini memberikan bukti bahwa penempatan pegawai yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, pengetahuan dan pemahaman pegawai mengenai PP Nomor 12 Tahun 2019, penguasaan pegawai terhadap hardware maupun software yang akan digunakan dalam implementasi regulasi tersebut, kemampuan pegawai dalam menyesuaikan dengan perubahan, dan kuantitas pelatihan dan bimbingan teknis yang pegawai ikuti mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan penerapan PP 12 Tahun 2019 pada Organisasi Perangkat Daerah tempat mereka bekerja. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Kuasa, 2016), (Humiang., 2019) (Sari, 2017) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan instansi pemerintah dalam implementasi akuntansi berbasis akrual, yang berarti semakin tinggi kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh pada semakin tingginya kesiapan penerapan PP 12 Tahun 2019.

#### *Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kesiapan Pemerintah dalam Penerapan PP No 12 Tahun 2019*

“Uno & Lamatenggo (2011):57) mengemukakan bahwa suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengolah data”. Pengolahan itu termasuk memproses, mengambil, menyusun, menyimpan,

memalsukan data dengan berbagai cara untuk mewujudkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. hal ini dimaksudkan semakin tinggi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dari pegawai dan pimpinan instansi pemerintah daerah dalam menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 maka tingkat kesiapan penerapan regulasi tersebut pada organisasi akan semakin meningkat.

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa  $t_{hitung}$  (4.671) >  $t_{tabel}$  (1.982) dan Sig. (0.000) < (0.05). Ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal kesiapan Pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019 pada aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemda telah berkomitmen untuk mewujudkan implementasi PP 12 Tahun 2019 secara efektif dan efisien yang ditandai dengan adanya bagian akuntansi memiliki perangkat komputer yang memadai untuk melaksanakan tugas sehingga tidak menghambat dari kesiapan daerah dalam mengimplementasikan PP 12 ini mengingat dalam peraturan ini juga diminta membuat laporan dari perencanaan pelaksanaan dan penatausahaan dan pelaporan, pengolahan data transaksi keuangan telah menggunakan software yang mendukung pekerjaan sehingga meminimalisir kesalahan dan dengan adanya software ini juga menyeragamkan data transaksi untuk mendukung pekerjaan, kemudian dengan didukung jaringan internet telah dipasang diunit kerja dan dimanfaatkan sebagai penghubung antar kerja dalam pengiriman data informasi yang dibutuhkan sehingga efisien dalam hal birokrasi, pengolahan keuangan daerah sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dilakukan secara komputerisasi dan laporan keuangan juga sudah terintegrasi dengan system informasi sehingga mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan, dan jadwal pemeliharaan serta perbaikan alat peralatan yang rusak sesuai dengan jadwal sehingga tidak menghambat tugas dari kesiapan implementasi PP 12 sehingga menghasilkan hal positif dalam pemanfaatan teknologi Informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Made et al., 2015)(Kuasa, 2016)

Oleh karena itu hasil ini sejalan dengan Peraturan pemerintah no 56 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dimana dikatakan pemerintah pusat dan pemda memiliki kewajiban untuk memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi untuk menaikkan kompetensi pengelola keuangan daerah dan membagikan informasi keuangan daerah kepada pelayanan public.. Hal ini sejalan dengan, Kristyono et al. (2014). yang menyatakan bahwa "Perangkat Pendukung yang memadai berpengaruh dan dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan".

### *Pengaruh Gaya kepemimpinan terhadap Kesiapan Pemerintah dalam Penerapan PP No 12 Tahun 2019*

Yulk mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Yulk (2005). Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa  $t_{hitung} (4.588) > t_{tabel} (1.982)$  dan  $Sig. (0.000) < (0.05)$ . Ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Pimpinan instansi Daerah Kabupaten Kampar memiliki komitmen dalam menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam hal implementasi PP 12 tahun 2019, serta menekankan pentingnya mengapa perlu diterapkan PP 12 tahun 2019 ini serta meminta pelaksanaann regulasi baru ini dengan sebaik-baiknya, pimpinan kabupaten Kampar juga menekankan pentingnya efisiensi dalam menerapkan PP 12 tahun 2019 dan meminta untuk menyelesaikan tugas terkait proses implementasi PP 12 tahun 2019 sesegera mungkin, juga pimpinan di instansi di Kampar memberitahu pegawai menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak tertentu dalam proses implementasi, serta pimpinan instansi ketika memberikan tugas biasanya berdiskusi dengan santai dan tidak kaku sehingga memberikan dampak positif baik bagi pegawai di instansi maupun dalam hal mempersiapkan implementasi regulasi PP 12 tahun 2019, hal ini sejalan dengan penelitian yang Sari (2017). Semakin tinggi peran gaya kepemimpinan instansi daerah dalam hal kesiapan penerapan PP 12 tahun 2019 maka akan semakin tinggi kesiapan dalam implementasi PP 12 tahun 2019 hal ini sejalan Berdasarkan Teori Kurt Lewin mengenai jenis-jenis gaya kepemimpinan, maka gaya kepemimpinan dapat diukur dengan pemberian tanggung jawab secara jelas dan rinci, bersikap tegas kepada para anggota terkait tugas yang dikerjakan, mendukung keputusan anggota yang dianggap tepat, anggota berani untuk tidak menerima keputusan pemimpin dan menegur tindakan yang kurang tepat, pemimpin melakukan diskusi partisipatif dengan anggota, serta pemberian wewenang dan kepercayaan kepada anggota Semakin baik/sesuai gaya kepemimpinan dalam sektor pemerintahan, maka implementasi PP 12 akrual akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena gaya kepemimpinan yang baik tentunya akan membawa dampak kenyamanan dan kemudahan bagi para pegawai dalam melakukan pekerjaannya sehingga akan membawa dampak optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam lingkup Instansi, Oleh karena itu setegas atau sesantai apapun, sebaik apapun Gaya Kepemimpinan seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sub bagian keuangan dalam mengatur, menjelaskan, dan memimpin pegawainya, jika pegawai tersebut tersebut telah memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap penyelesaian tugas-tugasnya serta memiliki pemahaman terkait SAP berbasis akrual, maka Gaya Kepemimpinan tidak akan memiliki pengaruh. Hal ini disebabkan pegawai

keuangan yang berkualitas tinggi tersebut tetap akan menjalankan seluruh tugastugasnya tanpa diberitahu atau dijelaskan beberapa kali pun oleh pimpinan. Pegawai bagian keuangan juga tetap akan menjalankan tugas-tugasnya, baik ada campur tangan yang besar oleh pimpinan maupun tidak ada.

### **5. Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan, Saran**

Dari hasil pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan Kualitas Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan implementasi PP 12 tahun 2019, artinya implikasi atas sikap, kemampuan, dan pengetahuan, jika baik sikap dari sumberdaya manusia seperti ramah, sopan dan menjaga etika dan integritas maka akan mempengaruhi dari kelancaran dalam hal mempersiapkan implementasi regulasi ini.

Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kesiapan PP 12 tahun 2019, artinya Implikasi terhadap perangkat, pengelolaan keuangan dan perawatan dengan adanya perangkat pendukung seperti komputer dan alat pedukung maka akan meningkatkan dari kesiapan dari masing-masing instansi maka akan berimplikasi mempermudah dalam hal pengelolaan keuangan dengan adanya perangkat yang baik maka akan memperlancar dalam hal kesiapan, dan didukung dengan adanya perawatan yang rutin dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin tingginya kesiapan dalam hal kesiapan PP 12 tahun 2019 di daerah kabupaten Kampar Pemanfaatan teknologi informasi seperti pemanfaatan dan penggunaan teknologi maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan PP 12 tahun 2019.

Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan PP 12 tahun 2019, artinya pengusulan tujuan yang ingin dicapai, penekanan akan pentingnya tugas, penekanan atas pentingnya efisensi kerja, menjalin hubungan yang baik dengan orang tertentu ketika melaksanakan tugas, pendiskusian tugas dengan fleksibel, menjalin hubungan yang baik dengan bawahan maka akan semakin tingginya kesiapan dalam hal Gaya Kepemimpinan maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dalam mengimplementasikan PP 12 tahun 2019.

Penelitian memiliki berbagai keterbatasan diantaranya tidak melakukan wawancara langsung kepada responden. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada OPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar saja, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesiapan penerapan PP 12 Tahun 2019 di pemerintah daerah lain. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Gaya Kepemimpinan. Diduga masih ada faktor lain yang dapat menjadi variabel seperti Komitmen Organisasi, Infrastruktur motivasi, Kebijakan Akuntansi dan lain sebagainya.

Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden, sehingga responden dapat bertanya secara langsung kepada peneliti atas pertanyaan-pertanyaan yang belum difahami dari kuesioner yang diberikan. Penelitian ini hanya mengambil populasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar saja, oleh karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada ruang lingkup yang lebih luas karena apabila diperbanyak populasi dan sampelnya kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variable lain yang mempengaruhi kesiapan pemerintah dalam menerapkan perubahan regulasi.

Bagi Organisasi Perangkat Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun dalam hal meningkatkan kesiapan implementasi PP 12 Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian proses penatausahaan keuangan daerah tidak terkendala karena pimpinan dan pegawai instansi pemerintah daerah belum siap dalam berbagai aspek atau mengalami halangan perubahan terhadap regulasi tersebut.

Penelitian ini juga memiliki kontribusi secara teoritis yaitu mendukung teori new public management yang menekankan adanya pembaharuan akuntansi pada organisasi sektor publik. Terbitnya regulasi yang baru merupakan upaya pemerintah dalam menerapkan *new public management*.

## Daftar Pustaka

- Adventana, G. A., & Kurniawan, C. H. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi Diy Dalam Implementasi Sap Berbasis Akrua Menurut Pp No. 71 Tahun 2010. *Artikel Publikasi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*.
- Ajhar, A., & Pituringsih, E. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis Akrua Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3, 62-73.
- Arikunto. (2004). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara .
- Bunea, C. B & Cosmina. (2006). Arguments for Introducing accrual based accounting in Public Sector.
- Davis, N. (2010). Accrual Accounting And The Australian Public Sector-A Legitimation Explanation. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 4(2), 61-78.
- Dimiyati, H. (2014). *Model Kepemimpinan & Sistem Pengambilan Keputusan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dwi R, A., & Lismawati, L. (2012) Pengaruh Kemampuan Sumberdaya Manusia (Pegawai) Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomi Unib*).
- Delanno, G. F., & Deviani, D. (2013). Pengaruh Kapasitas Sdm, Pemanfaatan Ti Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(1).
- Edison, E. A. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Febrina.I.S., & Burhanuddin., L. . (2013). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- John. F.N diterjemahkan oleh La Midjan. (2003). *Sistem Informasi Akuntansi I Pendekatan Manual Pratika Penyusunan Metode dan Prosedur*. Bandung : Lembaga Informatika Akuntansi.
- Hartoyo, H. (2019). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Kabupaten Bima. *Jurnal Penkomi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 2(1), 45–74. <https://doi.org/10.33627/pk.v2i1.127>
- Hevesi, G. A. (2005). *Standards for Internal Control in New York State Government*. Tersedia [www. osc. state. ny. us](http://www.osc.state.ny.us).
- Hariyanto. (2014). Aseesmen Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hartoyo, H. (2019). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Kabupaten Bima. *Jurnal Penkomi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 2(1), 45–74. <https://doi.org/10.33627/pk.v2i1.127>
- Herlina, H. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi Pp 71 Tahun 2010 (Studi Empiris: Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 1(3).
- Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Harris, S. G. (2007). Readiness For Organizational Change: The Systematic Development Of A Scale. *The Journal of applied behavioral science*, 43(2), 232-255.
- Humiang.G.P., S. D. P. . & K. . (2019). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dan Dampaknya Terhadap Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Kota Bitung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah:: Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir (*Doctoral dissertation, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada*).
- Kuasa, N. & A. . (2016). *Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola keuangan, Regulasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue*. 5(2), 47–56.
- Kristyono, J., Raharjo, K., & Andini, R. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Keuangan Daerah Sesuai Pp 71/2010 (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TAHUN 2012/2013). *Jurnal Akuntansi Fakulats Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang*.
- Kusuma, R. S. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. *Ekonomika Dan Bisnis*, 127. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2182>
- Made, N., Widyastuti, A., Sujana, E., & Adiputra, I. M. P., Ak, S. I., Pendidikan, U., Akuntansi, J., Program, S., & No, V. (2015). *Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi*. 3(1).
- Martani. (2019). Entitas pemerintahan diperoleh dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2019/07/Entitas-Pemerintah-25072019-1.pptx>.
- Nugroho, W. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: PT. Glora Aksara Prima.
- Nurlizzaty, K., & Abdul Rohman, A. R. (2011). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (Studi Pada Blu Universitas Diponegoro Semarang) (*Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro*).
- Pratiwi, A. I., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia, Komitmen, Dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Bandung. *eProceedings of Management*, 4(2).
- Permana, I. B. G. Bayu., dan Wiratmaja, I. D. Nyoman. (2016). Pengaruh Sumber Daya Mnesia, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi pada Kesiapan Penerapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN:

2260-2287, Vol.16, No.3.

- Putra, I.W.G.Y. dan Ariyanto, D. (2015) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Issn: 2302-8556 EJurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1(2015): 14-32.*
- Prihadi, S. F. (2004). Identifikasi, Pengukuran dan Pengembangan Kompetensi. *Universitas Terbuka, Jakarta.*
- Purwoko, A. P. (2017). Kesiapan untuk Berubah dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Civil Rivai, Z. V. (2014). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Rahmawati. H.I. (2015). *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU No 6 TAHUN 2014 Tentang Desa ( Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman ) The 2 nd University Research Coloquium 2015 ISSN 2407-9189. 6, 305–313.*
- Ritonga, I.T. (2010). Akuntansi Pemerintahan Daerah. *Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM. Service, 11(2), 27–38. file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/1551-3213-1-SM.pdf*
- Ritonga, M. (2015). Akuntansi Akrua dan Penerapannya Di Sektor Publik: Agenda Pembaharuan Di Indonesia. Skripsi. Program Studi S1 Departemen Akuntansi Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Sugiyono, (2013), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: ALFABETA)
- Sampel. I.F., Kalangi., R. . (2015). Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis Akrua. *Jurnal EMBA, 37(3), 343. https://doi.org/10.18907/jjsre.37.3\_343\_4*
- Sari, R. P. (2017). *Pengaruh Komunikasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua.*
- Sitorus. S., Kalangi .L ., & K. W. . (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP.No.71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA, 3(71), 941–949.*
- Simanjuntak, B. H. (2010). Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan di Indonesia. *Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.*
- Susanti, T.F. & Agusti, R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sap Berbasis Akrua Di Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jom Fekon Unri, 11-24.*
- Uno, H. B., & Lamatenggo, N. (2011). *Teknologi. Komunikasi dan Informasi Pembelajaran,* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi, 5(2), 88–98. https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270*
- Yukl, Gary. (2005). *Kepemimpinan dalam Organisasi.* Jakarta: PT. Indeks.
- Zuliarti. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. *Skripsi Universitas Muria Kudus.*
- Regulasi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014). tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- KSAP (2010) *Definisi kesiapan PP 71 tahun 2010.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- PP 58 Tahun (2005). *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- PP 12 Tahun (2019). *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: sekretariat Negara.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun (2013). *Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.*